

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DIY**

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
			PENGECUALIAN	AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1	Dokumen kepegawaian : (Kenaikan pangkat, Kenaikan gaji berkala, Mutasi, Pensiun dan Administrasi kepegawaian)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;	Selama menjadi PNS	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
2'	Daftar Nilai SKP PNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i;	Selama masih berlaku	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
3	Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i;	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	- Membantu kelancaran proses penegakan hukum - Melindungi rahasia pribadi seorang PNS - Mengamankan proses penyusunan kebijakan
4	Keputusan ijin/ keterangan tentang perceraian PNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i;	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	- Melindungi rahasia pribadi seorang PNS - Mengamankan proses penyusunan kebijakan
5	Lokasi Penyimpanan Arsip	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i; - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf i;	Selama masih berlaku	Mengungkap memorandum atau surat menyurat yang menurut sifatnya dirahasiakan	Kerahasiaan lokasi terjaga
6	Arsip dinamis, aktif dan inaktif, yang berisikan : a. Dokumen keuangan: - SPJ berikut lampirannya - Dokumen anggaran - Surat pencairan anggaran	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17; - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan (2);	Selama masih berlaku	Menghambat proses penegakan hukum	Menyediakan data lengkap yang dilindungi
7	Dokumen Proses Pengadaan Barang/Jasa	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j;	Sampai diketahui pemenangnya	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Melaksanakan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan
8	Rincian Harga Perkisaran Sendiri (HPS)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j;	Sampai diketahui pemenangnya	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/ jasa	Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/ jasa
9	Dokumen Penawaran dari Penyedia Barang/ Jasa	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j;	Selama proses pengadaan barang dan jasa	- Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Dapat menjamin obyektifitas penilaian/ evaluasi penawaran
10	Susunan Kepanitiaan Pengadaan Barang/ Jasa	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b;	Selama proses pengadaan barang dan jasa	Dapat terjadi harga lelang tidak sesuai dengan yang diharapkan	Menghindari konflik kepentingan, menjaga persaingan lelang yang sehat, melindungi kerahasiaan dokumen
11	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan	Mengungkap rahasia (data kekayaan) pribadi	Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
			Pengecualian	Akibat bila dibuka	Manfaat jika ditutup
12	Laporan Keuangan Daerah (Laporan keuangan yang belum diaudit)	- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1); - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j;	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan
13	Kertas kerja pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya, review laporan keuangan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i;	Selama masih berlaku	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan
14	Data Teknis Potensi Hutan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf d;	Selama potensi hutan diperkirakan masih ada	Dapat mengungkap kekayaan alam	Mempermudah pengaturan dan pengelolaan SDA
15	Rencana Penertiban/ Penindakan dan Penegakan pada Obyek Tertentu	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf i;	Sampai dengan selesai dilaksanakan	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (Operasi penindakan dapat berjalan sesuai rencana)
16	Informasi perkara pelanggaran perda yang sedang ditangani PPNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf i;	Sampai dengan selesainya proses penanganan	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (Perkara akan dapat diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku)
17	Informasi hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran perda	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf i;	Sampai selesai kasusnya	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan sebagai bahan pertimbangan untuk melaksanakan operasi
18	Informasi data pribadi penegak perda	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i;	Sampai ada persetujuan tertulis dari penegak perda yang bersangkutan	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat mengungkap rahasia pribadi penegak hukum - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	- Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (personil dapat bertugas tanpa adanya rasa takut apabila terjadi rasa ketidakpuasan pelanggaran perda - Melindungi rahasia pribadi penegak hukum
19	Berita Acara Pemeriksaan	- UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i;	Selama proses pemeriksaan	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat mengungkap rahasia pribadi obyek terperiksa - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	- Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan melindungi data-data pribadi obyek terperiksa
20	Proses penyelesaian perkara yang sedang ditangani	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a;	Selama ada persetujuan tertulis dari pihak-pihak yang bersengketa	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Membantu kelancaran proses penegakan hukum
21	Dokumen penyelesaian sengketa/ konflik lingkungan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a;	Sampai dengan diserahkan kepada penuntut (jaksa)	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Membantu kelancaran proses penegakan hukum

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
			PENGECUALIAN	AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAATJIKA DITUTUP
				penyusunan kebijakan	- Melindungi rahasia pribadi penegak hukum
19	Berita Acara Pemeriksaan	- UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i;	Selama proses pemeriksaan	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat mengungkap rahasia pribadi obyek terperiksa - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	- Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan melindungi data-data pribadi obyek terperiksa
20	Proses penyelesaian perkara yang sedang ditangani	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a;	Selama ada persetujuan tertulis dari pihak-pihak yang bersengketa	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Membantu kelancaran proses penegakan hukum
21	Dokumen penyelesaian sengketa/ konflik lingkungan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a;	Sampai dengan diserahkan kepada penuntut (jaksa)	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Membantu kelancaran proses penegakan hukum
22	Pertimbangan teknis tukar-menukar dan pinjam pakai kawasan hutan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i;	Sampai dengan ditetapkannya keputusan/ perjanjian tukar-menukar dan pinjam pakai	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan (mengganggu keberhasilan proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan)	Kelancaran proses tukar-menukar dan pinjam pakai sesuai dengan ketentuan
23	Hasil penelitian potensi sumber daya flora dan fauna yang masih dalam proses identifikasi	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf d;	Setelah dinyatakan untuk publik	Dapat mengungkap kekayaan alam Indonesia (eksploitasi yang tidak terkendali oleh pihak yang tidak berhak)	Melindungi/ menjaga kekayaan alam Indonesia (Sumber Daya plasma nutfah)
24	Peta Kekayaan Sumber Daya Hutan	UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Selama diperkirakan masih ada sumber dayanya	Mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat	Melindungi kekayaan alam
25	Rencana Operasi Gabungan Pengamanaan Hutan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i;	Sampai pelaksanaan operasi	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur
26	Disposisi Surat Pimpinan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i;	Selama belum ada tindak lanjut dari SKPD pengelola surat	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan

Yogyakarta, Maret 2018
Kepala Dinas

Ir. R. Sutarto, MP
NIP. 19601001 198503 1 008